

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

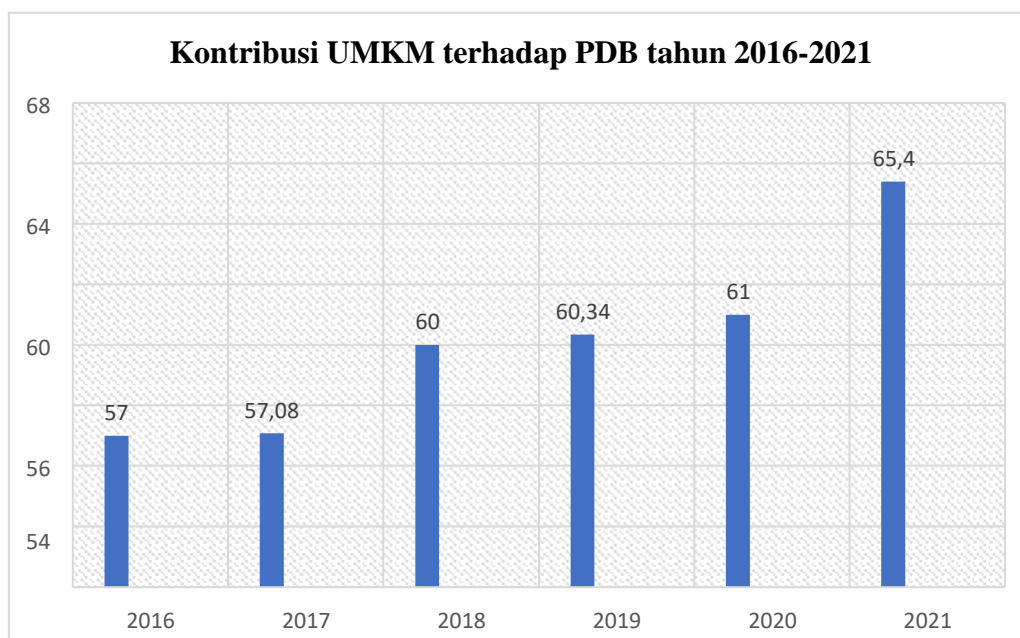
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Sebagai negara dengan populasi yang tinggi, Indonesia menghadapi beragam tantangan dan peluang dalam pembangunan ekonomi serta sosial. Jumlah penduduk yang besar ini menawarkan potensi pasar yang luas dan sumber daya manusia melimpah, yang dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna menunjang kemajuan negara secara menyeluruh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, penduduk Indonesia mencapai 278 juta orang, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, hanya di bawah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Tingginya jumlah penduduk ini mendorong pemerintah untuk melakukan perencanaan pembangunan yang efektif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan ini adalah serangkaian aturan yang mengatur penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Rencana ini digunakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi antara para pelaku pembangunan. Sistem ini memastikan adanya integrasi, keterkaitan, dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.

Pendidikan masyarakat memainkan peran penting sebagai elemen fundamental dalam membangun kapasitas individu dan komunitas untuk mencapai tujuan pembangunan. Pendidikan tidak hanya mencakup proses pembelajaran formal, tetapi juga melibatkan pelatihan dan pemberdayaan sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Melalui pelatihan, individu memperoleh keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari, sementara pemberdayaan berfokus pada pengembangan potensi individu dan komunitas agar mereka lebih mandiri dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan juga menjadi sarana bagi individu untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial yang diperlukan dalam kehidupan nyata. Dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Pendidikan memiliki peranan krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang efektif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa sistem pendidikan harus diatur secara adil dan demokratis, tanpa diskriminasi, dengan tetap menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, budaya, serta keberagaman nasional. Sistem pendidikan juga harus dirancang sebagai suatu kesatuan yang terbuka dan bermakna. Pendidikan adalah proses menjadi diri sendiri dan menemukan makna hidup. Pencarian jati diri terjadi dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Pendidikan telah menjadi bagian penting dalam setiap kelompok sosial sepanjang sejarah manusia untuk meningkatkan budaya dan kualitas hidup. Salah satu cara terbaik dan paling efisien untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dengan masa depan umat manusia.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM tahun 2021 mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM juga menghadapi berbagai tantangan. UMKM yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Pendekatan pembangunan "bottom-up" melibatkan perencanaan dan pelaksanaan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat dalam proses dari pengajuan ide hingga evaluasi program yang telah dilaksanakan. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai pembangunan berbasis masyarakat,

menggunakan model yang lebih luas dan sinergis untuk menciptakan peluang sosial berbasis keluarga dan masyarakat, serta mengutamakan kepentingan kolektif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Keberhasilan dalam pengembangan sistem "bottom-up" terlihat dari hubungan dan integrasi berbagai sumber daya masyarakat untuk mendukung kesejahteraan bersama. UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian bangsa. Di Indonesia, Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh swasta dan/atau perseorangan. Selain itu, UMKM adalah tulang punggung perekonomian di banyak negara dan memberikan pendapatan serta lapangan kerja bagi banyak orang di seluruh dunia. Sektor UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi negara dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian, peran UMKM dalam merekrut tenaga kerja sangat besar, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan UMKM yang terus meningkat dan berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa pangsa UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekitar 65,4%.



Gambar 1.1 Gambar Pertumbuhan Kontribusi UMKM terhadap PDB 2021

Menurut Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia menunjukkan tren positif antara tahun 2016 hingga 2021. Pangsa UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai keberhasilan, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif dan inovasi untuk memajukan sektor UMKM. Salah satu upaya tersebut adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyediakan pembiayaan dengan bunga rendah, serta Program Peningkatan Produktivitas UMKM (P3UMKM) yang menawarkan pendampingan bagi kelompok-kelompok usaha.

UMKM menjadi pilihan karena dapat memberdayakan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 8 yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonom. Pekerjaan yang layak dalam kondisi aman dan stabil merupakan komponen penting dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, terkait dengan aspek pengurangan kelaparan dan peningkatan kesehatan. Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan, yang menekankan partisipasi masyarakat, sangat relevan. Model *Learning Exchange* muncul sebagai solusi potensial untuk mendukung pemberdayaan UMKM dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pelaku usaha. Melalui model ini, pelaku UMKM dapat saling belajar dan berbagi wawasan praktis, mengatasi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, serta meningkatkan kemandirian dalam proses pembelajaran. *Learning Exchange* menuntut adanya fleksibilitas dan kolaborasi dalam pembelajaran, menciptakan interaksi yang lebih egaliter, di mana setiap peserta berperan sebagai pembelajar sekaligus pengajar. Beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas model ini dalam meningkatkan kemandirian dan keterampilan belajar. Hodge et al. (2011) menemukan bahwa pertukaran pembelajaran berbasis praktik dapat memberikan pengalaman belajar yang transformatif. Sementara itu, Mulyana (2006) menekankan bahwa model ini memungkinkan individu dan pengusaha untuk bertukar pengalaman dan

pengetahuan secara efektif. Namun, masih terdapat sedikit penelitian yang mengeksplorasi bagaimana *Learning Exchange* dapat mendukung UMKM di era digital.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Komunitas UMKM Cimahi Kreatif Ekonomi Produktif (CIKEPO) di Kota Cimahi, komunitas ini terdiri dari 75 anggota dengan latar belakang usaha yang beragam. Pemelajar dewasa di kelompok UMKM Komunitas CIKEPO menunjukkan tingkat kemandirian belajar yang rendah. Mereka cenderung bergantung pada pelatihan formal dan bantuan eksternal untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru. Keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber belajar menjadi faktor utama yang menghambat kemandirian belajar mereka. Model *Learning Exchange* di Komunitas CIKEPO masih menghadapi berbagai kendala. Proses pelaksanaannya sering kali kurang terstruktur dan tidak didukung dengan persiapan yang memadai. Implementasi sesi *Learning Exchange* yang tidak optimal, serta evaluasi yang lemah, turut menghambat efektivitasnya dalam meningkatkan kemandirian belajar. Agar model *Learning Exchange* dapat berfungsi dengan baik, diperlukan konstruksi yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik komunitas UMKM di CIKEPO. Desain program harus fleksibel dan adaptif, dengan metode pembelajaran yang partisipatif serta kolaboratif. Sumber daya yang memadai, baik dalam hal fasilitator maupun materi pembelajaran, juga harus disediakan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan kemandirian belajar dapat diukur dan dianalisis secara tepat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Model *Learning Exchange* Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Pemelajar Orang Dewasa (Studi Pada Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah Di Komunitas CIKEPO Kota Cimahi).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi awal kemandirian belajar pemelajar orang dewasa pada kelompok UMKM di Komunitas CIKEPO Kota Cimahi?
2. Bagaimana tahapan proses pelaksanaan model *Learning Exchange* dalam meningkatkan kemandirian belajar pemelajar orang dewasa pada kelompok UMKM di Komunitas CIKEPO, Kota Cimahi?

3. Bagaimana hasil konstruksi model *Learning Exchange* dalam meningkatkan kemandirian belajar pemelajar orang dewasa pada kelompok UMKM di Komunitas CIKEPO, Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian di atas adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan Kondisi awal kemandirian belajar pemelajar dewasa pada kelompok UMKM di Komunitas CIKEPO, Kota Cimahi.
2. Mendeskripsikan bagaimana proses *Learning Exchange* dilakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar pemelajar dewasa pada kelompok UMKM di Komunitas CIKEPO, Kota Cimahi.
3. Mendeskripsikan hasil konstruksi model *Learning Exchange* dalam meningkatkan kemandirian belajar pemelajar dewasa pada kelompok UMKM di Komunitas CIKEPO, Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pendidikan masyarakat dan proses *Learning Exchange* pada UMKM. Pengembangan model *Learning Exchange* dalam UMKM ini menjadi dasar teoritis yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan model *Learning Exchange* di kalangan pelaku UMKM.

2. Manfaat2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu dan pembelajaran kewirausahaan untuk mendukung konsep-konsep teori Pendidikan Masyarakat serta menjadi bahan ajar bagi pembina UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi analisis penerapan *Learning Exchange* pada pelaku UMKM, memberikan wawasan mengenai pelaksanaan *Learning Exchange* pada UMKM.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu konsep akan diukur dan diidentifikasi. Berikut Definisi operasional dari penelitian ini :

1. *Learning Exchange*: adalah model pembelajaran yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antara individu atau kelompok. Konsep ini menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, memungkinkan pembelajar menjadi pengajar, dan sebaliknya. *Learning Exchange* dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik formal maupun nonformal, dan sering kali diterapkan dalam komunitas atau organisasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan lokal.
2. Kemandirian belajar: Istilah "kemandirian belajar" mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk merencanakan, melacak, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada guru atau institusi pendidikan.
3. Pemelajar Orang Dewasa dalam penelitian ini merujuk pada individu dewasa yang terlibat dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Untuk memudahkan pembahasan dan persiapan lebih lanjut, penulis menyajikan proses penulisan penelitian secara sistematis. Struktur organisasi ini berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 787/UN40/HK/2021 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021:

1. BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang penelitian, Rumusan masalah masalah penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Struktur organisasi tesis.
2. BAB II Kajian Pustaka terdiri atas tinjauan teoritis yang terdiri dari Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Kemandirian, Konsep Kemandirian belajar Konsep *Learning exchange*, Konsep *Learning Exchange* berdasarkan perspektif *Collaborative learning*, Konsep kewirausahaan, Konsep UMKM,

Konsep Pendidikan Orang Dewasa.

3. BAB III Metode Penelitian terdiri atas Desain penelitian, Partisipan dan tempat penelitian, Pengumpulan data, Teknik analisis data, triangulasi, dan Isu etik.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan terdiri atas Deskripsi Lokasi penelitian, Temuan dari penelitian, Pembahasan hasil temuan untuk menggambarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.
5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi berisikan Kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah yang telah ditentukan, Implikasi dan rekomendasi kepada Fasilitator, Pengurus komunitas dan Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.
6. Daftar Pustaka, Terdiri dari Kumpulan sumber referensi yang digunakan.
7. Lampiran, Terdiri dari Dokumen tambahan dan informasi pendukung lainnya.